

INVENTARIS ARSIP
DEPARTEMEN ANGKATAN LAUT (1964 - 1967)



Disusun oleh:
Maria Immaculata SP
NIP: 360 000 639

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA
2001

INVENTARIS ARSIP
DEPARTEMEN ANGKATAN LAUT

DISUSUN OLEH

MARIA IMMACULATA SP

NIP: 360 000 639

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

JAKARTA

2001

PENDAHULUAN

I. SEJARAH ORGANISASI

Angkatan Laut Republik Indonesia merupakan bagian integral dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dengan ciri dan kepribadian yang khas berdwifungsi sebagai alat pertahanan keamanan nasional dan sebagai alat revolusi yang tangguh.

Angkatan Laut Republik Indonesia yang dilahirkan dalam kancah perjuangan fisik pernah mendapatkan julukan Angkatan Laut Gunung karena ruang gerak di lingkungan laut, namun demikian tidak menjadi rintangan yang pada akhirnya kekuatan ALRI terus bertambah dengan pesat baik dibidang materiil berupa penambahan kapal-kapal dan fasilitas-fasilitas di darat, di bidang personil penyempurnaan organisasi yang berlandaskan semata-mata atas kepribadian bangsa sendiri sehingga dewasa ini telah benar-benar merupakan kekuatan tempur yang disegani.

1.1. Periode Revolusi Fisik

Keadaan di bidang maritim, sebagai akibat daripada politik penjajahan Belanda, maka jiwa bahari Bangsa Indonesia hampir dapat dilenyapkan oleh pemerintah Belanda. Dalam masa tiga abad penjajahan, Belanda hampir berhasil melenyapkan potensi maritime kita dari lautan dan menjadikan Bangsa Indonesia menjadi suatu bangsa petani yang terpecah belah di pulau-pulau tanpa memiliki kekuasaan atas lautan sekitar pulau itu.

Secara singkat pendidikan kearah kelautan dijamin penjajahan Belanda praktis tidak ada dan dari daftar lembaga-lembaga pendidikan yang dibawah ini hanya sedikit bangsa Indonesia yang boleh mengikutinya. Lembaga itu adalah:

1. *Prins Hendrik School Afdeling Zeevaartkundig Leergang* di Jakarta untuk mendidik calon mualim Pelayaran Bisnis.
2. *Kweek School voor Inlandse Schepenlingen* di Makasar, untuk mendidik calon rendahan dari Koninklijke Marine.
3. *Zeevaartschool* di Surabaya, *afdeling B.S.A.S* dan *I.K.V* untuk mendidik calon mualim Pelayaran Besar dan mualim Pelayaran Interinsulair dan calon mualim Pelayaran Indonesia dan calon masinis.

Ketika Jepang menduduki Indonesia, untuk mengambil hati dan memihakkan bangsa Indonesia pada bangsa Jepang dalam peperangan menghadapi sekutu, maka Jepang banyak memberikan kelonggaran dalam bidang politik dan militer. Hal ini terlihat dalam politik pendidikan kelautan, karena Jepang memerlukan tenaga-tenaga dalam waktu singkat untuk mengisi armada bantuannya untuk keperluan logistik pasukan-pasukan di garis depan.

Selama pendudukan Jepang didirikan:

1. Sekolah Pelayanan Bagian Tinggi (*Koote Zen Inju Yoseisho*) di Jakarta, Tegal, Semarang dan Cilacap dikenal S.P.T
2. Sekolah Pelayaran Rendah di Jakarta, Semarang dan Pesuruhan
3. Sekolah perikanan di Jakarta
4. Sekolah bangunan-bangunan kapal (*Zoken Gakko*) di Jakarta dan Surabaya
5. Latihan Pelayaran untuk menjadi pembantu Kaigun dan Butai (*Sen Zu Kunrensho*) di Makassar dan *Shonanto* (Singapura).

Setelah Republik Indonesia diproklamkan, pendidikan dibidang kelautan diteruskan walau sering terganggu karena persengkatan senjata antara republik Indonesia dan Belanda. Sekolah-sekolah Angkatan Laut dan Pelayaran yang didirikan setelah Proklamasi Kemerdekaan:

1. Sekolah angkatan Laut (S.A.L)
2. Latihan Opsir Kalibakung
3. Pendidikan "*Special Operation*"
4. Sekolah Radio Angkatan Laut di Malang
5. Sekolah Kader Pelaut

Susunan ALRI pada tanggal 17 Maret 1948

1. Kementerian Pertahanan: satu staf umum dan satu staf khusus Angkatan Laut
2. Pimpinan: Kepala Staf Angkatan Laut
3. Wakil Pimpinan: Wakil Kepala Staf Angkatan Laut
4. Diluar Kementerian diadakan pangkalan dan atau pendidikan (*Training Center*)
5. Didalam Angkatan, sementara tidak diadakan Tentara Laut (*Mariniers*)
6. Tentara Laut dilebur dalam TNI (Angkatan Darat)

7. A. Polisi angkatan Laut yang berdekatan dengan pangkalan dimasukkan menjadi Polisi Militer AL
B. Yang berada diluar angkatan sebagai Polisi Tentara menjadi Polisi Militer Angkatan Darat dibawah Komando tertinggi Angkatan Darat
8. Pengangkatan Kepala Staf dilaksanakan dengan segera dan tertib
9. Selama Kepala Staf AL dan wakilnya belum diangkat maka pada masa peralihan Wakil Ketua Komisi memimpin AL atas nama Menteri Pertahanan
10. Semua anggota AL yang tidak menjalankan perintah-perintah akan dipecat dari jabatannya dan dituntut dimuka Hakim Militer

1.2. Periode Survival (1950-1955) dan Periode Investment (Challenge dan Response terhadap Demokrasi Terpimpin (1955-1959))

Selama periode survival ini, pertumbuhan, perkembangan dan pembangunan negara jalannya revolusi mengalami berbagai kemacetan disebabkan karena situasi/berkecamuknya penyelewengan diberbagai bidang yang menimbulkan berbagai dualisme.

Angkatan Laut RI yang dilakukan dalam kancah perjuangan fisik, dan telah mempertahankan hidupnya dengan peralatan sederhana serta personil yang terbatas, semenjak pengakuan kedaulatan 27 Desember 1949 memikul tanggung jawab yang berat untuk menjaga, melindungi dan mempertahankan daerah maritim yang terdiri dari banyak pulau dan selat-selat.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai angkatan yang berkewajiban mengamankan dan mempertahankan integrasi negara Indonesia terutama didalam wilayah kekuasaannya, ALRI telah menerima warisan material dan personil serta fasilitas dari Koninklijke Marine melalui perjanjian KMB.

Semua pertentangan tersebut mencapai puncaknya pada tanggal 5 Juli 1959 dengan Dekrit Presiden kembali ke UUD 1945 dan penentuan Manipo sebagai haluan negara. Selanjutnya tugas pokok Angkatan Laut Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

Tugas primer, yaitu tugas perang:

- a. Mempertahankan negara terhadap segala serangan musuh asing (luar negeri) dilautan dan yang memenuhi lautan
- b. Menjamin terselenggaranya perhubungan antar pulau dan tetap terbukanya tempat-tempat pelabuhan guna kepentingan perekonomian rakyat

Tugas sekunder, yaitu tugas polisionil: mempertahankan perundang-undangan negara diperairan Indonesia dan pengamanan (pasifikasi daerah)

Dengan demikian untuk Angkatan Laut pada masa 1950-1959 merupakan satu kesatuan masa dimana terdapat garis policy yang sama kedalam dan keluar.

1.3. Periode Panca Warsa Manipol (1959-1964)

Tahun 1959 merupakan tahun yang sangat penting dalam sejarah negara kita, karena telah menemukan kembali jiwa revolusi kita, ditambah adanya perkembangan-perkembangan penting dalam tahun itu, yaitu:

1. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 untuk kembali ke UUD 1945
2. Pidato Presiden 17 Agustus 1959 yang menggariskan haluan negara: Manipol dan Usdek

Dengan adanya haluan negara, kita mempunyai landasan yang tegas dan tujuan yang jelas yaitu masyarakat sosial yang adil dan makmur. Demikian pula dengan pembangunan Angkatan perang yang berjalan dengan lancar. Pada saat itu pula ALRI tidak ketinggalan dalam taraf perkembangannya untuk memenuhi kebutuhan negara.

Pada masa ini Angkatan Laut mengandung arti organisasi Angkatan Laut keseluruhannya termasuk Korps Komando Angkatan Laut RI yang merupakan salah satu organisasi Angkatan Bersenjata RI yang langsung dibawah pembinaan Wakil Perdana Menteri Pertama Bidang Pertahanan/Keamanan/Kepala Staf Angkatan Bersenjata.

Tugas pokok Angkatan Laut:

1. Mempertahankan integrasi wilayah perairan Nasional sesuai dengan kedudukan Negara Republik Indonesia sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat

2. Menjamin keamanan serta mengadakan pengawasan terhadap segala usaha dalam bidang maritim yang merupakan unsur penting bagi pembangunan serta kehidupan negara dan rakyat Indonesia
3. Menyelenggarakan pertahanan pantai nasional
4. Menyelenggarakan angkatan laut militer untuk Angkatan Bersenjata dan Pemerintah

Departemen Angkatan laut merupakan pusat kekuasaan eksekutif dan Markas Besar Angkatan Laut dan melahirkan kebijaksanaan umum dalam melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Policy, melaksanakan dan mempertahankan politik dan kepentingan nasional dalam mengembangkan dan menggunakan AL
2. Komando, memegang komando atas Kesatuan-kesatuan Operasional AL dan memeliharanya dalam keadaan siap sedia untuk tugas perang atau tugas-tugas lainnya. Mengeluarkan direktif-direktif serta instruksi-instruksi yang bersangkutan dengan soal-soal operasi, perhubungan AL dan sebagainya.
3. Logistik, meliputi administrasi dan pengendalian logistik. Mengkoordinir dan memimpin kegiatan-kegiatan dari Departemen AL dan pendirian-pendirian darat untuk menjamin pengembangan, pengusaha, produksi dan distribusi dari material, fasilitas dan personel kepada kesatuan-kesatuan operasionil.
4. Administrasi Pembinaan, melaksanakan administrasi pembinaan dari AL, meliputi memelihara dan mengembangkan AL yang ekonomis dan efisiensi terutama dalam soal organisasi, staffing, prosedur-prosedur administratif personel, material, fasilitas-fasilitas penyusunan anggaran belanja dan pemakaian keuangan.

Dalam melaksanakan fungsi-fungsi pokok, Departemen Angkatan Laut mengadakan pembagian tugas, kekuasaan dan tanggung jawab sebagai berikut:

- I. Pengendalian policy berada ditangan Menteri/Panglima AL
- II. Komando berada ditangan:
 1. Deputi I Menteri/Panglima AL
 2. Panglima Korps Komando AL
- III. Logistik (administrasi dan pengendaliannya) berada di tangan:
 1. Deputi II Menteri/Panglima AL dibantu para asisten eksekutif dan asisten teknis

2. Deputi I Menteri/Panglima AL
 3. Panglima Korps Komando AL
- IV. Administrasi pembinaan berada ditangan Deputi II Menteri/Panglima AL dibantu asisten eksekutif dan asisten teknis.

1.4. Periode Mahkota

Tahun 1965 dimulai dengan peristiwa yang sangat berpengaruh dan merupakan puncak dalam perlawanan Bangsa Indonesia terhadap kekuatan lama yang disebut the *old established forces* dikenal juga gejala-gejala kolonialisme dan neo-kolonialisme.

Keadaan umum negara kita sudah tentu tergambar dalam tubuh Angkatan Laut. Men/Pangal menginstruksikan supaya tanah milik Angkatan Laut yang kosong dan tidak dipergunakan ditanami dengan bahan pangan, agar memberi manfaat bagi anggota Angkatan Laut RI.

Dalam pembinaan bidang materiil dilakukan penyelidikan roket-roket dan senjata dengan tenaga dan kekuatan sendiri.

II. SEJARAH ARSIP

Arsip Departemen Angkatan Laut yang dikerjakan kali ini meliputi periode 1960-1967 sebanyak 0,5 meter lari. Arsip tersebut diserahkan Setum ALRI ke Arsip Nasional RI pada bulan September 1999. Penyerahannya dilakukan di Mabes Angkatan Laut, Cilangkap, dan mulai dikerjakan untuk dibuat inventarisnya pada bulan Desember 1999.

Kondisi fisik arsip dalam keadaan baik. Sedangkan informasinya mayoritas meliputi Surat-surat Keputusan, Peraturan Pemerintah, dan sebagainya.

SKEMA PENGATURAN ARSIP

- I. KEBIJAKSANAAN
 - 1.1. Undang-undang
 - 1.2. Peraturan Pemerintah
 - 1.3. Keputusan Presiden
 - 1.4. Penetapan Presiden
 - 1.5. Keputusan Menteri/Kepala Staf Angkatan Laut

- II. KOMANDO
 - 2.1. Pembentukan Kodamar dan Kosetal
 - 2.2. Komando Ganyang Malaysia
 - 2.3. Komando Operasi Tertinggi
 - 2.4. Partai Komunis Indonesia (PKI)
 - 2.5. Dwikora
 - 2.6. Front Nasional
 - 2.7. Cakrabirawa

- III. LOGISTIK
 - 3.1. Perumahan
 - 3.2. Kendaraan/Kapal

- IV. ADMINISTRASI PEMBINAAN
 - 4.1. Organisasi
 - 4.2. Kenaikan Pangkat
 - 4.3. Pebebastugasan
 - 4.4. Pendelegasian Wewenang
 - 4.5. Penghargaan

- V. PENDIDIKAN

- VI. PEMULIHAN KETERTIBAN DAN KEAMANAN
 - 6.1. Angkatan Bersenjata
 - 6.2. Kerjasama Internasional

INVENTARIS ARSIP
DEPARTEMEN ANGKATAN LAUT

I. KEBIJAKSANAAN

1.1. Undang-undang

1. Undang-undang No. 8/1966 tentang keanggotaan RI dalam Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank).

Salinan

8 Nopember 1966

1 lembaran

2. Undang-undang No. 7/1966 tentang persetujuan kerajaan Belanda dan RI mengenai keuangan.

Salinan

8 Nopember 1966

1 lembaran

3. Undang-undang No. 9/1966 tentang keanggotaan kembali RI dalam moneter internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional untuk rekonstruksi dan pembangunan (International Bank for Reconstruction and Development).

Salinan

22 Nopember 1966

1 lembaran

1.2. Peraturan Pemerintah

4. PP No. 43/1965 tentang penyelenggaraan dan pengawasan industri maritim.

Salinan

Tahun 1965

1 lembar

5. PP No. 6/1966 tentang penghapusan pengadilan adat/swapradja dan pembentukan pengadilan-pengadilan negeri di Irian Barat.

Salinan
12 April 1966
1 sampul

1.3. Keputusan Presiden

6. Keppres No. 15/1964 tentang penambagan wilayah kuasa Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Indonesia (PN Pertamina).

Salinan
20 Januari 1964
2 lembar

7. Keppres No. 102/1965 tentang pengangkatan Menteri/wakil ketua dan para Deputi Menteri/Ketua Lembaga Pertahanan Nasional.

Salinan
6 Mei 1966
1 lembaran

8. Keppres No. 138/1965 tentang pengangkatan para Deputi Menteri/Panglima angkatan Kepolisian.

Salinan
24 Mei 1965
1 lembaran

9. Lampiran SK. No. 84/1965 tentang arti dan makna tanda kepangkatan perwira tinggi ABRI.

Salinan
24 April 1965
1 lembar

10. Keppres No. 2/1966 tentang kebijaksanaan khusus dalam penetapan syarat-syarat Ketua Pengadilan Tentara (Militer) Tinggi.

Salinan
4 Januari 1966
1 lembaran

11. Keppres No. 36/1966 tentang perubahan status Yayasan Gedung Pola.

- Salinan
17 Februari 1966
1 lembar
12. Keppres No. 37/1966 tentang Badan Intan Indonesia.
- Salinan
12 Mei 1966
1 lembar
13. Keppres No. 38/1966 tentang susunan Kabinet Dwikora yang disempurnakan, disertai lampiran.
- Salinan
21 Februari 1966
1 sampul
14. Keppres No. 64/1966 tentang departemen-departemen yang menjadi bagiannya, disertai lampiran.
- Salinan
27 Maret-28 Okt 1966
1 sampul
15. Keppres No. 81/1966 tentang penetapan susunan personalia pimpinan MPRS, DPR-GR, DPA, dan BPK.
- Salinan
19 April 1966
1 lembar
16. Keppres No. 170/1966 tentang struktur dasar organisasi dan bidang tugas departemen-departemen pada Kabinet Ampera.
- Salinan
3 September 1966
1 lembaran
17. Keppres No. 224/1966 tentang pembentukan panitia negara peringatan Hari Pahlawan.
- Salinan
20 Oktober 1966
1 lembar

18. Keppres No. 235/1966 tentang pembubaran “Dana Sukarela Dwikora”.

Salinan
2 Nopember 1966
1 lembar

1.4. Penetapan Presiden

19. Penetapan Presiden No. 3/1966 tentang susunan DPA, disertai lampiran.

Salinan
1965-1966
1 sampul

1.5. Keputusan Menteri/Kepala Staf Angkatan Laut

20. SK. Menteri/Kepala Staf Angkatan Laut No. 1700.1 tentang penetapan makam anggota-anggota Angkatan Laut di Djalaksana sebagai Makam Pahlawan.

Salinan
10 Oktober 1966
1 sampul

21. SK. Menteri/Ka. Staf AL No. 1700.2 tentang penetapan Kapten Laut Samadikum menjadi Pahlawan Samudera.

Salinan
10 Oktober 1966
1 sampul

22. SK. Menteri/Ka. Staf AL No. 5000.1/1967 tentang pengesahan penyempurnaan doktrin Perjuangan ALRI “Eka Casana Jaya”.

Salinan
2 Februari 1967
1 sampul

23. SK. Menteri/Panglima No. 5000.3/1967 tentang rencana pengembangan kekuatan ALRI 1967-1970.

Salinan

- 16 April 1967
1 sampul
24. SK. Menteri/Panglima AL No. 5000.4/1967 tentang rencana kerja Angkatan Laut RI tahun 1967.
- Salinan
16 April 1967
1 sampul
25. Instruksi Menteri/Panglima AL No. 5000.6/1966 tentang penyerahan alat-alat/barang-barang bukti milik para ex. Menteri yang diamankan.
- Salinan
14 Nopember 1966
1 lembaran
26. SK. Menteri/Panglima AL No. 5401.1/1967 tentang proyek penelitian dan pengembangan pembangunan industri maritim.
- Salinan
23 Januari 1967
1 lembaran
27. SK. Menteri/Ka. Staf AL No. 5401.17 tentang penetapan wilayah hukum penguasa pelaksana daerah maritim seluruh Indonesia.
- Salinan
4 Mei 1967
1 lembaran
28. SK. Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri/Panglima AL tentang kedudukan dan daerah hukum Badan Peradilan di Lingkungan Angkatan Laut.
- Salinan
23 Mei 1966, 4 Mei 1967
1 sampul

II. KOMANDO

2.1. Pembentukan Kodamar dan Kosetal

29. Seri SK. Menteri/Pangal No. 5401.6 dan 5401.45 tahun 1965 tentang pembentukan team khusus.

Salinan

5 Maret, 10 Des 1965

1 sampul

30. Seri SK. Menteri/Pangal No. 5401.3 s.d. 5401.79 tahun 1966 tentang pembentukan Komando Daerah Militer.

Salinan

13 Jan-23 Des 1966

1 sampul

31. SK. Menteri/Pangal No. 5401.24/1967 tentang pembubaran komponen strategis laut siaga.

Salinan

19 Juni 1967

1 lembaran

32. Seri SK. Menteri/Pangal No. 5420.2 s.d. 5420.52 tahun 1965 tentang pembentukan dan pembubaran Komando Khusus.

Nb. Tidak lengkap

Salinan

15 Jan-24 Nop 1965

1 sampul

33. Seri SK. Menteri/Pangal 5420.1 s.d. 5420.3 tahun 1966 tentang pembentukan tim kerjasama.

Salinan

4 Jan-13 Nop 1966

1 sampul

34. SK. Menteri/Pangal No. 5420.1, 5420.23, 5420.24 tahun 1967 tentang keanggotaan Dewan Kebijakan Angkatan Laut.

Salinan

7 Januari, Nop 1967

1 sampul

35. SK. Menteri/Pangal No. 3060.1 tentang militerisasi tenaga/pegawai tingkat Perwira di bidang maritim.

- Salinan
26 Oktober 1965
1 lembaran
36. SK. Panglima Komando Daerah Militer V No. Pepelrada-V.6000.1 tentang Komando Daerah Militer.
- Salinan
12 Februari 1965
2 lembar
37. SK. Panglima Kodamar I No. A/1/47 tentang peresmian adanya korps sukarelawati Narendraduhita.
- Tembusan
16 Agustus 1965
1 lembaran
38. SK. Menteri/Pangal No. 5060.6/1965 tentang penetapan berdirinya korps komando Angkatan Laut.
- Salinan
7 Oktober 1965
1 lembaran
39. SK. Panglima Kodamar I tentang pelantikan Brigade Nelayan Maritim I.
- Salinan
16 Agustus 1965
1 lembar
40. SK. Menteri/Ka. Staf No. 11010.1 tentang peningkatan kedudukan hukum Kasetal Balikpapan menjadi Kosional Balikpapan.
- Salinan
23 Maret 1966
1 lembaran
41. SK. Menteri/Ka. Staf Angkatan Laut No. 1300.1 tentang pembubaran Komando Polisi Angkatan Laut.
- Salinan
16 Mei 1966

- 1 lembaran
42. Instruksi Menteri/Pangal No. 5000.18/1967 tentang kerjasama komando armada dan lembaga pertahanan maritim.
- Salinan
2 Oktober 1967
3 lembar
43. SK. Menteri/Pangal No. 5500.1/1967 tentang pengamatan dan pengawasan kegiatan-kegiatan lepas pantai wilayah territorial RI.
- Salinan
28 Mei 1967
1 lembaran
44. Surat Kodamar X kepada Menpangal tentang militerisasi.
- Asli
7 April 1967
2 lembar

2.2. Komando Ganyang Malaysia

45. UU No. 5/1966 tentang normalisasi hubungan antara RI dan Malaysia.
- Salinan
27 Oktober 1966
1 sampul
46. Keppres No. 40/1966, 61/1966-63/1966, 299/1966, 236/1966 tentang Organisasi Ganyang Malaysia.
- Salinan
22 Feb-2 Nop 1966
1 sampul
47. Surat dari Komando Gabungan daerah NTT kepada Menteri/Pangal tentang Panca Tunggal NTT.
- Salinan
24 Maret 1966

1 sampul
48. Surat Perintah No. SPN-43/Kogam/4/1966 tentang pembentukan 7 team penerangan lapangan.

Salinan
20 April 1966

1 sampul
49. Laporan Komandan Latihan Gabungan tentang latihan operasi gabungan.

Asli, Salinan
Oktober 1966
1 sampul

2.3. Komando Operasi Tertinggi

50. Keppres No. 321/1964 tentang pengintegrasian tugas dan kebijaksanaan Komando Operasi Tertinggi.

Salinan
15 Desember 1964
1 lembaran

51. Keppres No. 4/Koti/1965, 13/Koti/1965, 16/Koti/1965, 17/Koti/1965, 182/Koti/1965 tentang pertanggungjawaban Kabinet Dwikora.

Salinan
25 Jan-12 Des 1965
1 sampul

52. Keppres No. 8/Koti/1966 tentang perusahaan film AS di Indonesia dibawah penerangan Koti.

Salinan
14 Januari 1966
1 lembaran

53. SK. Kepala Staf Kesatuan Operasi Koti II di bidang Ekonomi No. 0259/Kesop.II/1965 tentang pembentukan tim khusus daerah Sumatera Utara.

Salinan
18 Maret 1965

- 2 lembar
54. Pengumuman-pengumuman tentang integrase tugas dan kebijaksanaan kedalam Organisasi Komando Operasi Tertinggi.
- Salinan
1965-1966
1 sampul
55. Telegram tentang sukarelawan Angkatan Laut.
- Asli, Tindakan
Sept-Okt 1965
1 sampul
56. Surat Pernyataan Komandan Dwikora tentang Gerakan Sukarelawan.
- Salinan
17 Januari 1966
1 lembar
57. Surat Koti kepada Departemen Angkatan Laut tentang jawaban atas keputusan DPA.
- Salinan
4 Maret 1965
1 sampul
58. SK. Menteri/Ka. Staf AL No. 4740.1 tentang organisasi, tugas serta tanggungjawab dari Komando Penyelamat Bawah Air Angkatan Laut.
- Salinan
29 Mei 1961
1 lembaran

2.4. Partai Komunis Indonesia (PKI)

59. Surat Instruksi Menteri/Pangal No. 1620.1 s.d. 1620.3 tentang pengawasan perwira yang telah mendapatkan indoktrinasi.
- Salinan
Maret-Juni 1965
1 sampul

60. Pengumuman No. 001/Koti/10/1965 s.d. 003/Koti/10/1965 tentang Hari Berkabung Nasional karena peristiwa G 30 S/PKI.

Salinan

Oktober 1965

1 sampul

61. SK. Menko Hankam No. M/A/7/1965 tentang perubahan susunan team indoktrinasi staf Angkatan Bersenjata.

Salinan

14 Januari 1965

1 sampul

62. Surat Komandan Latihan Operasi Gabungan kepada Menko Hankam tentang pelaksanaan indoktrinasi.

Asli

25 Nopember 1965

1 sampul

63. SK. Men/Pangal No. 5401.43/1963 tentang peresmian batalion radar A pertahanan udara Angkatan Laut.

Salinan

27 Nopember 1965

1 lembaran

2.5. Dwikora

64. SK. Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah Maritim Sumsel, Jambi, Lampung, Jabar dan Kalbar No. 14/223/Pepelrada/65 dan 15/223/Pepelrada/65 tentang penentuan team pemeriksa kejadian 4 Nopember 1965.

Salinan

10, 13 Nopember 1965

1 sampul

65. SK. Menteri/Pangal No. 3121.1 tentang pemberian ijin pada Panglima Komando Operasi Khusus Angkatan Laut untuk mempergunakan para perwira ex. GPPR yang masuk dalam rehabilitasi center untuk tugas-tugas khusus dalam pelaksanaan Dwikora.

- Salinan
2 Mei 1965
1 lembaran
66. SK. Menteri/Pangal No. 1050.1 tentang penampungan dan penyaluran ex. GPPR.
- Salinan
12 Juli 1965
1 lembaran
67. Surat dari Penguasa Pelaksana Dwikora tentang keadaan keamanan, kebersihan dan kesehatan di sekitar Tanjung Priok.
- Asli
17 Nopember 1965
2 lembar
68. Surat dari Pemerintah Revolusioner Negara Kesatuan Kalimantan Utara kepada Menteri Dwikora tentang tindakan untuk mengamankan jalannya revolusi dan proklamasi 8 Desember 1962.
- Asli
12 April 1966
1 sampul
69. Surat Komando Resimen Dwikora Jateng dan DIY tentang pidato pada HUT MEN “Dwikora” ke I/1966.
- Stensilan
20 Oktober 1966
1 sampul

2.6. Front Nasional

70. SK. PBFN No. 133/Kpts/PBFN/XII/1964 tentang penetapan Sekjen dan wakil-wakilnya.
- Salinan
25 Desember 1964
1 lembaran
71. SK. PBFN No. 008/Kpts/PBFN/I/1965 tentang pemberhentian untuk sementara waktu parpol Murba dan ormas-ormasnya dari keanggotaan FN.

- Salinan
7 Januari 1965
1 lembaran
72. SK. PBFN No. 180/Kpts/PBFN/X/1965 tentang pemberian tunjangan representasi bagi Sekjen PBFN.
- Salinan
22 Oktober 1965
1 lembaran
73. Surat dari PBFN kepada Departemen Angkatan Laut tentang kerjasama FN dan pemerintah.
- Salinan
1 Oktober 1964
1 sampul
74. Surat dari PBFN kepada Departemen AL tentang kebulatan tekad untuk melaksanakan tugas-tugas yang tercantum dalam amanat Tavip.
- Salinan
17 Januari 1965
1 lembar

2.7. Cakrabirawa

75. Komandan Tertinggi ABRI Resimen Cakrabirawa: Kumpulan SK. Kep-024/5/1965, Kep-025/5/1965, Kep-097/11/1965-Kep-099/11/1965 tentang jabatan dan kegiatan dalam Cakrabirawa.
- Salinan
Mei-Nopember 1965
1 sampul

III. LOGISTIK

3.1. Perumahan

76. SK. Menteri Perhubungan Laut No. Sek.8/7/25 dan Sek.8/8/1 tentang perpanjangan tempat tinggal.

- Salinan
15 Jan-15 Juli 1965
1 sampul
77. SK. Menteri/Pangal No. 11101.2/1967, 11101.3/1967 tentang peraturan pokok perumahan untuk anggota Angkatan Laut.

- Salinan
23 Des 1966, 16 Sep 1967
1 sampul
78. SK. Menteri/Pangal No. 72220.7 tentang peraturan tunjangan tugas berbahaya.

- Salinan
15 Februari 1965
1 lembaran
79. Surat dari Departemen Angkatan Laut kepada Direktur Ditperblatal tentang penetapan uang lauk pauk.

Pertinggal
15 Juni 1965
1 sampul

3.2. Kendaraan/Kapal

80. SK. Menteri/Panglima No. 5030.19, 5030.22 tahun 1967 tentang penomoran kendaraan bermotor.

Salinan
25 Juli, 2 Agst 1967
1 sampul

81. SK. Menteri/Panglima AL No. 5441.1/1965 s.d. 5441.5/1965 dan 5441.1/1966 s.d. 5441.16/1966 tentang kedudukan dan nama-nama kapal perang.

Salinan
1965-1967
1 sampul

82. Surat Kepala Jahidral kepada Kepala BPU Djakumal tentang bentuk dan tanda cap kapal-kapal RI Burdjamhal dan Dewakembar.

Konsep
26 April 1965
1 lembar

83. SK. Menteri Perhubungan Laut No. PC.8/2/15 tentang pelepasan secara organik unit dok/galangan PN Jakarta Lloyd.

Salinan
16 Juli 1965
1 lembar

84. SK. Menteri Perhubungan Laut No. Sek.6/4/1 tentang pemungutan dana khusus pembinaan perahu layar, disertai lampiran.

Salinan
3 September 1965
1 sampul

IV. ADMINISTRASI PEMBINAAN

85. SK. Menteri Koordinator No. M/B/175/65 dan No. DC/B/276/65 tentang perpanjangan masa kerja panitia pemusnahan.

Salinan
Tahun 1965
1 sampul

86. Surat Instruksi No. Instr.Men/Pangal 5050.1 dan 5050.2 tentang perwira staf inti.

Salinan
28 April-25 Mei 1965
1 sampul

87. SK. Menteri/Panglima Angkatan Laut No. 5050.1 dan 5050.2 tahun 1967 Dinas ALRI.

Salinan
4 Februari
2 lembaran

88. SK. Menteri/Pangal No. 5216.2-5216.9 tentang bentuk dan tanda cap yang dipakai markas Korps Wanita AL (Makowal).

Salinan

23 Februari-29 Apr 1965

1 sampul

89. SK. Menteri/Pangal No. 10520.1-10520.3 tentang bendera jabatan Presiden Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal).

Salinan

29 Maret-1 Nop 1965

1 sampul

90. SK. Panglima Korps Komando AL No. 10520.2/1966 tentang bendera batalyon 8 para amphi Korps Komando AL, disertai lampiran.

Salinan

19 Juli 1966

1 sampul

91. Seri SK. Menko Kompartimen Hankam Kepala Staf Angkatan Bersenjata tentang mensahkan penggunaan cap baru.

Salinan

18 Februari-25 Nop 1965

1 sampul

92. SK. Menteri Veteran dan Demobilisasi No. 153.2.5/1966 tentang pengesahan/pemakaian tanda-tanda jabatan.

Salinan

15 April 1966

2 lembar

93. SK. Panglima Korps Komando AL No. 4034.1/1966 tentang tanda lokasi batalyon para amphi Korps Komando AL.

Salinan

25 Juli 1966

1 lembaran

94. SK. Panglima Korps Komando AL No. 10120.5/1966 tentang pemberian baret kehormatan anggota militer non KKO-AL.
- Salinan
20 Mei 1966
2 lembar
95. SK. Menteri/Ka. Staf No. 1650.2 tentang pemberian brevet kehormatan ALRI.
- Salinan
29 Juli 1966
1 lembaran
96. SK. Menteri/Panglima AL No. 7220.14 tentang tunjangan brevet sandi.
- Salinan
24 April 1965
1 lembaran
97. SK. Menteri/Pangal tentang bentuk dan tanda cap yang dipakai kapal perang I Burdjamhal dan Dewakembar.
- Salinan
22 Juli 1965
2 lembar
98. Telegram Departemen AL tentang rencana “Sambutan Menteri/Panglima AL pada Pembukaan Rapat Panglima”.
- Asli
15 Juni 1965
1 sampul
99. SK. Menteri/Panglima No. 5030.1 s.d. 5030.36 tentang pemakaian tanda brevet.
- Salinan
20 Jan 1964-15 Maret 1967
1 sampul
100. SK. Menteri/Pangal No. 5030.4 s.d. 5030.39/1966 dan 5030.1/1967, 5030.5/1967 tentang bentuk, makna, pemberian tanda bahu/badge.
- Salinan
7 Des 1966-8 Juli 1967

101. SK. Panglima Korps Komando AL No. Kep. KKO. 10520.1-10520.8 tentang pemberian pataka pada pasukan komando armada.

1 sampul

Salinan

16 Januari-8 Juli 1967

1 sampul

102. SK. Menteri/Ka. Staf AL No. 5030.7-5030.18 tentang pemberian pataka Kodamar V.

Salinan

17 Mar 1966-29 Juli 1967

1 sampul

4.1. Organisasi

103. SK. Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri/Ka. Staf AL No. J.B.I/3/21 tentang tempat kedudukan badan-badan peradilan ketentaraan.

Salinan

2 Nopember 1961

1 lembaran

104. SK. Menteri/Pangal No. 5401.4-5401.33 tentang susunan organisasi.

Nb. Tidak lengkap

Salinan

15 Maret-9 Okt 1965

1 sampul

105. SK. Menteri/Pangal No. Kab.4/9/16 tentang lapangan kerja, tugas, susunan dan pimpinan Departemen Angkatan Laut.

Salinan

4 Mei 1965

1 lembaran

106. SK. Menteri/Pangal No./1966 tentang organisasi sekretariat Kementerian Angkatan Laut.

Konsep

14 Juni 1966

- 1 lembaran
107. SK. Komando Mandala Satu Komando Daerah Pertahanan “F” No. 1/1/006/1965 tentang organisasi, tugas dan tata cara kerja Komando Daerah Pertahanan “F”.
- Salinan
14 Agustus 1965
1 lembaran
108. SK. Panglima Kodamar I No. 1/1/Kpts-208/65 tentang susunan dan tugas Brigade Nelayan Maritim I.
- Salinan
25 Agustus 1965
1 lembaran
109. SK. Menteri Perhubungan No. Kab.4/31/21 tentang susunan organisasi dan tugas asisten pengamanan produksi/alat-alat produksi.
- Salinan
1 Oktober 1965
1 lembaran
110. SK. Menteri Perhubungan Laut No. Kab.4/36/15 tentang susunan, tugas dan tata kerja Dewan Pelabuhan.
- Salinan
30 Nopember 1965
2 lembar
111. Surat Instruksi Menteri/Pangal No. Instr.Men/Pangal 5401.31 tentang pembagian tugas para ADC’s pribadi Menteri/Pangal.
- Salinan
28 September 1965
1 sampul
112. SK. Panglima Korps Komando AL No. 5401.8-5401.80 tentang susunan organisasi dan tata kerja Biro Perhubungan Korps Komando AL.
- Nb. Tidak lengkap
- Salinan
13 April-23 Des 1966

113. SK. Menteri/Ka. Staf AL No. 5401.5, 5401.6, 5401.18, 5401.31 tentang organisasi dan tugas pusat penelitian dan pengembangan Angkatan Laut.

1 sampul

Salinan

15 Maret-2 Agst 1967

1 sampul

4.2. Personil

114. SK. Presiden RI No. 3/1965 tentang penyerahan pada wakil PM III/Menko Kompartimen Pembangunan untuk mengatur dan membimbing Legiun Veteran.

Salinan

14 Januari 1965

1 lembaran

115. SK. Menteri Perhubungan Laut No. Peg.3/49/1 tentang penetapan Kpt. Laut Roesdan Saidi untuk memperoleh tunjangan.

Salinan

11 Agustus 1965

1 lembaran

116. SK. No. Kotam.001/SK/Pang/1965 tentang penembakan dan perubahan formasi personalia Staf Kotam-57.

Salinan

23 September 1965

1 sampul

117. Surat Komando Daerah Maritim I pelaksana Dwikora daerah Pangdam I tentang penyerahan sejumlah orang pada Pangdam I.

Tembusan

28 Oktober 1965

2 lembar

118. SK. Menteri/Ka. Staf AL tentang penunjukan instruktur Konsultasi Sekolah Komando Umum AL.

- Salinan
16 Februari 1966
1 lembaran
119. Surat Departemen AL kepada Menko Maritim/Menteri Perhubungan tentang penarikan PATI yang diperbantukan pada Deperla.
- Asli
15 Maret 1966
1 lembar
120. Surat Panglima Koalmil pada Sekretaris Menteri/Pangal tentang serah terima jabatan.
- Asli
7 Juni 1966
1 lembar
121. Surat dari Seskoal kepada Departemen AL tentang timbang terima Komandan Sekolah Komando Umum AL.
- Asli
15 September 1966
1 sampul
122. Surat Instruksi No. 5000.19/1967 tentang penempatan para pegawai AL di Konatal Manokwari.
- Salinan
7 Oktober 1967
1 sampul
123. SK. Panglima Angkatan Laut No. 1800.133 tentang ketentuan perhitungan masa kerja pensium militer bagi ex. anggota K.P.P.A.L.
- Salinan
27 Nopember 1967
3 lembar

4.3. Kenaikan Pangkat

124. SK. Menteri/Pangal No. 1401.1, 1401.2 tentang penambahan keanggotaan perwira menengah AL.

Salinan
1963-1965
1 sampul

125. SK. Panglima Kodamar V No. Pepelrada V.1000.13 tentang pengangkatan pejabat-pejabat sebagai pembantu khusus pepelrada maritime daerah pelabuhan.

Salinan
25 Oktober 1965
2 lembar

126. SK. Menteri/Pangal No. 1301.113 tentang penunjukan perwira menengah sebagai Komandan Batalyon Daerah Pertahanan Udara.

Salinan
10 Nopember 1965
1 sampul

127. SK. Menteri/Pangal No. 1301.127 tentang pengangkatan para lulusan A.I.P menjadi militer wajib (perwira cadangan).

Salinan
30 Desember 1965
1 sampul

128. SK. Presiden/Panglima Tertinggi ABRI No. 4/Koti/1966 tentang pengangkatan Serka Nurmayn Taher menjadi perwira dengan pangkat Effectief dan Corps.

Salinan
1 Januari 1966
1 sampul

129. SK. Menteri/Ka. Staf No. 1401.1 tentang keanggotaan Dewan Kepangkatan Perwira Menengah AL yang baru.

Salinan
2 Maret 1966
1 lembaran

130. SK. Presiden/Pangti ABRI No. 33/Pangti/11/1966 tentang kenaikan pangkat Mayjen KKO. Hartono menjadi Lethen terhitung 1 Juli 1966.

Salinan

8 Juli 1966

1 sampul

131. SK. Panglima Kodamar V No. Pepelrada-V.100.49 tentang pengangkatan Dan Kosional Kendari sebagai pembantu Pepelrada Pelabuhan Kendari.

Salinan

16 September 1966

3 lembar

132. SK. Menteri/Ka. Staf No. 1301.23, 1301.76, 1301.77 tentang pengangkatan Panglima Kodamar.

Salinan

2 Maret-15 Agst 1966

1 sampul

133. SK. Menteri/Ka. Staf No. 5401.53, 5401.56 tentang pengangkatan dan penunjukan Panglima beserta pejabat-pejabat Kohandamar.

Salinan

8-25 Agustus 1966

1 sampul

4.4. Pembebastugasn

134. Keppres No. 159/1966 tentang pembebastugasan orang-orang yang berjasa pada bangsa dan negara, disertai lampiran.

Salinan

1966

1 lembaran

135. Keppres/Pangti ABRI No. 1/3/1966 tentang pembubaran PKI dan seluruh ormasnya.

Salinan

1966

1 lembaran

136. SK. Menteri Perhubungan No. Peg.3/48/1 tentang pembebasan dengan hormat ch. Malik sebagai nahkoda.

Salinan

20 Agustus 1965

1 lembar

137. SK. Komando Mandala Satu No. 3000.1/16/1965 tentang penghentian sementara segala kegiatan PKI dan ormasnya.

Salinan

25 Oktober 1965

2 lembar

138. SK. Menteri Perhubungan Laut No. Peg/ist/1/1965 tentang pemberhentian Sdr. Amanan untuk sementara waktu.

Salinan

29 Oktober 1965

1 lembar

139. Surat perintah Maritim I Aceh/Sumut/Sumbar No. I/2/SP.291/1965 tentang penonaktifan sementara beberapa orang dari pekerjaan/jabatannya.

Asli

14 Nopember 1965

2 lembar

140. Surat Instruksi Menteri Kompartimen Pertahanan Keamanan No. III/B/151/65 tentang penyelesaian Kontra Revolusi Gestapu.

Salinan

1 Desember 1965

1 lembar

141. SK. PBFN No. 118/Kpts/PBFN/V/1965 tentang pemberhentian dengan tidak hormat Sdr. Andijat sebagai sekretaris.

Salinan

30 Maret 1965

1 lembar

142. Surat Instruksi Presiden/Pangti ABRI No.1/3/1966 tentang semua ormas untuk sementara tidak menampung anggota ex. PKI.

Salinan

14 Maret 1966

1 sampul

143. Surat Pernyataan Pengurus cabang FN tentang peristiwa yang memecah belah Persatuan Nasional.

Stensilan

15 Maret 1965

1 lembar

144. Surat-surat Pernyataan Partai Politik tentang sikap Kontra Revolusi pada G 30 S/PKI.

Tembusan

11 Oktober 1965

2 lembar

145. Surat PBFN ranting Tegalrejo tentang pemecatan sementara wakil-wakil PKI dan ormasnya.

Tembusan

31 Oktober 1965

2 lembar

146. Surat Ali Sadikin kepada Departemen Angkatan Laut tentang pembebasan Wanbidjal sebagai Gubernur DKI.

Pertinggal

28 Juli 1966

2 lembar

147. SK. Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan RI No. 11887/C.II, 12638/C.II tentang schorsing bagi pegawai yang terlibat G 30 S/PKI.

Salinan

26 Okt, 10 Nop 1965

1 sampul

148. SK. Presiden/Pangti ABRI/Koti No. 115/Koti/1965, 171/Koti/1965, 172/Koti/1965 14/Koti/1966, 29/Koti/1966 tentang pemberhentian para Perwira Tinggi.

Salinan

1965-1966

1 sampul

149. SK. Menko Kompartimen Pertahanan/Keamanan Ka. Staf Angkatan Bersenjata No. M/E/163/1965, M/E/195/1965, M/E/197/1965, M/E/280/1965 tentang pemberhentian dari jabatan lama Militer Sukarela.

Salinan

30 Agst-10 Des 1965

1 sampul

4.5. Pendelegasian Wewenang

150. SK. Menteri/Pangal No. 5402.1-5402.5 tentang pemberian wewenang di lingkungan Angkatan Laut.

Salinan

29 Apr 1965-20 Sep 1966

1 sampul

4.6. Penghargaan

151. SK. Menteri/Pangal No. 1301.114 tentang pengangkatan Dr. Amoroso Katamsi.

Salinan

1965

1 sampul

152. SK. Presiden/Pangti ABRI No. 111/Koti/1965, 180-181/Koti/1965 tentang penganugerahan Pahlawan Revolusi.

Salinan

Oktober-Desember 1965

1 sampul

153. SK. Menteri/Pangal No. 1650.1/1965, 1650.1/1966-1650.10/1967 tentang pemberian tanda kehormatan.

Salinan

1965, 1967

154. SK. Menteri/Ketua Lemhanas No. 0020/Kpts/LPN/1965 tentang pengangkatan perwira sebagai anggota Panitia Penyusunan Dokumentasi lahirnya Lembaga Pertahanan Nasional.
- 1 sampul
Salinan
1964-1965
1 sampul
155. SK. Menteri Perhubungan Laut No. Peg/157/2/1965 tentang pengangkatan Sdr. Soejadji sebagai Kadapel/Penguasa Pelabuhan Djambi.
- Salinan
29 Oktober 1965
1 lembar
156. SK. Menteri/Pangal No. 1301-73 tentang pengangkatan Sdr. Muchtar sebagai Gubernur/Kepala Daerah Swatantra Tk. I, Jateng.
- Salinan
20 Juli 1965
1 sampul
157. SK. Menteri/Pangal No. 1421.177 tentang kenaikan pangkat Komandan Laut Soedomo.
- Salinan
24 September 1965
1 sampul
158. SK. Menteri/Pangal No. 5030.22 tentang penangkatan Presiden/Pangti ABRI/Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno sebagai “Bapak Hiu Kencana Agung”.
- Salinan
5 Oktober 1965
1 sampul
159. SK. Menteri/Pangal No. 12340.388 tentang kenaikan pangkat Sdr. Abdul Gafur.
- Salinan
8 Nopember 1965
1 sampul
160. SK. Menteri Perhubungan Laut No. P.C.8/3/11 tentang pengangkatan Sdr. Sudharno Mustafa, SH sebagai Dirut P.N. Tundadara.

Salinan

9 Nopember 1965

1 lembar

161. SK. Menteri/Pangal No. 5060.8 tentang penganugerahan Satya Lencana Teladan.

Salinan

6 Desember 1965

1 sampul

162. Keppres No. 82/1966 tentang penangkatan KKO Ali Sadikin sebagai Gubernur/Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Salinan

20 April 1966

1 lembar

163. Keppres/Pangti ABRI No. 11/Koti/1966 dan 15/Koti/1966 tentang pemberian pangkat militer kehormatan.

Salinan

17 Januari 1966

1 sampul

164. SK. Menteri/Pangal No. 1301.49/1967 tentang pengangkatan Mayjen TNI/AD Amir Machmud sebagai anggota kehormatan warga Hiu Kencana.

Salinan

18 Mei 1967

3 lembar

V. PENDIDIKAN

165. SK. Bersama Menteri/Pangal dan Menteri No. 1520.10-L.P.1/1/18 tentang Kurikulum Dasar Keprajuritan pada Akademi Ilmu Pelayaran.

Salinan

13 Maret 1965

1 sampul

166. SK. Menteri Perhubungan Laut No. Peg/13/5/3 tentang penugasan beberapa pegawai ke Yugoslavia untuk spesialisasi bidang Angkatan Laut, disertai lampiran.

- Salinan
22 Juli 1965
2 lembar
167. SK. Menteri/Pangal No. 1520.22 tentang peraturan dan pelaksanaan kursus Bahasa Rusia.
Salinan
1 September 1965
1 sampul
168. Keppres RI No. 25/1966 tentang persyaratan peserta angkatan ke II.
Salinan
2 Februari 1966
1 sampul
169. SK. Menteri/Pangal No. 5401.22/1967 tentang kurikulum pendidikan Jurusan Elektronika pada program regular Institut Ilmiah AL.
Salinan
3 Juni 1967
1 sampul
170. SK. Menteri/Pangal No. 5420.6-5420.21 tentang panitia ujian teknik kapal atas air bagi siswa Sekual ke II.
Nb. Tidak lengkap
Salinan
14 Feb-19 Okt 1967
1 sampul
171. SK. Menteri/Pangal No. 5000.6, 5000.9 tentang doktrin pendidikan AKABRI bagian laut.
Salinan
9 Mei, 6 Juni 1967
1 sampul
172. SK. Menteri/Pangal No. 1620.1-1520.37 tentang pendidikan dan latihan kelautan, disertai lampiran.
Salinan
1965-1967
1 sampul

173. SK. Menko Kompartimen Hankam Ka. Staf Angkatan Bersenjata No. M.B.44/65 tentang pengesahan rencana pendidikan anggota militer dan sipil.

Salinan

2 Maret 1965

2 lembar

VI. PEMULIHAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN

174. SK. Menko Kompartimen Pertahanan/Keamanan Ka. Staf Angkatan Bersenjata No. M/B/43/65 tentang penganugerahan penghargaan bagi WNI yang membantu ABRI dalam pemulihan keamanan dalam negeri.

Salinan

1 Maret 1965

2 lembar

175. SK. Sekretaris Koordinator Urusan Irian Barat No. K/035/Sek.KIB/1965 tentang pembentukan panitia Team Operasi Pembangunan Masyarakat Gotong Royong.

Salinan

20 Juli 1965

1 lembar

176. Surat Komando Daerah Maritim III kepada Pangdamar III tentang pembentukan Operasi Waspada Tanjung Priuk, disertai lampiran.

Asli, Salinan

1965

1 sampul

177. SK. Menko Kompartimen Hankam/Ka. Staf ABRI No. M/B/196/65 tentang penentuan struktur organisasi latihan operasi gabungan antar sesko.

Salinan

30 Agustus 1965

1 sampul

178. Surat dari Kodamar III kepada Ketua Umum Hari Bahari tentang peristiwa 22 September 1965 yang menyangkut prestise Angkatan Laut.

Asli

29 September 1965

1 lembar

179. SK. Panglima Kodamar V No. Pepelrada Mar-V.1000.11 tentang pelarangan untuk sementara waktu kegiatan-kegiatan partai politik dan organisasi massa di wilayah hukum pepelrada laut Sulsel, Kaltim, dan Kalsel.

Salinan

19 Oktober 1965

2 lembar

180. SK. Panglima Komadar V No. PepelradaV.1000.12 tentang penempatan daerah-daerah pelabuhan dibawah pengawasan pepelrada maritim.

Salinan

29 Oktober 1965

2 lembar

181. SK. Menko Kompartimen Hankam No. Push/1896/I/e-98/1965 tentang menyusun operasi bantuan “follow up operasi pemulihan keamanan dan ketertiban” pada tingkat pusat sampai daerah.

Salinan

7 Desember 1965

1 sampul

182. SK. Kepala Daerah Propinsi Irian Jaya No. 35/GIB/1966 tentang penertiban pelabuhan dan perhubungan laut di Irian Barat.

Salinan

1 April 1966

1 sampul

183. SK. Komandan Kopaska AL No. 272/Kep/66 tentang pembubaran kesatuan Komando Sukwan Angkatan Laut.

Salinan

22 Nopember 1966

1 lembar

184. Surat dari Mabes AL kepada seluruh Kodamar tentang peraturan penggantian nama Cina ke WNI.

Salinan
14 Maret 1967
1 sampul

6.1. Angkatan Bersenjata

185. SK. Menko Kompartimen Pertahanan/Keamanan No. M/A/248/64 tentang pembentukan biro khusus untuk persenjataan.

Salinan
12 Desember 1964
1 sampul

186. SK. Menko Kompartimen Pertahanan/Keamanan Kepala Staf Angkatan Bersenjata No. M/E/85/65, M/B/114/65, M/B/123/65, M/E/204/65 tentang pokok-pokok personil Angkatan Bersenjata dalam rangka penyusunan formasi.

Salinan
22 April-2 Sep 1965
1 sampul

187. SK. Menko Kompartimen Pertahanan/Keamanan Kepala Staf Angkatan Bersenjata No. M/F/87/1965 tentang honorarium tenaga bantuan dibidang kesehatan pada dinas kesehatan Angkatan Bersenjata.

Salinan
22 April 1965
1 lembaran

188. Surat Instruksi Menko Kompartimen No. III/B/109/65 tentang penunjukan solidaritas ABRI pada Musyawarah Besar Tani.

Asli
19 Juli 1965
1 lembar

189. SK. Menko Kompartimen Hankam/Ka Staf ABRI tentang pembentukan panitia kerja hari Angkatan Bersenjata ke XX di Jakarta.

Petikan

10 Agustus 1965

1 sampul

190. SK. Menko Kompartimen Hankam/Ka Staf ABRI No. M/A/270/65 tentang pemberhentian dari dinas militer.

Salinan

29 Nopember 1965

2 lembar

191. Surat dari Kementerian Angkatan Darat kepada Departemen Angkatan Laut tentang pernyataan bersama Pimpinan ABRI 15 Juli 1966.

Salinan

20 Juli 1966

1 sampul

192. Surat Menteri/Pangal kepada Ka Staf Hankam tentang perumusan RUU dan Doktrin Hankam.

Salinan

9 Februari 1967

1 sampul

193. SK. Menteri/Pangal No. 5401.38, 5401.47, 5401.60 tentang pembentukan kesatrian Angkatan Laut, disertai lampiran.

Salinan

1966-1967

1 sampul

6.2. Kerjasama Internasional

194. Surat Departemen angkatan Laut tentang keluarnya RI dari PBB yang berkaitan dengan keluarnya Veteran pejuang Kemerdekaan dari keanggotaan Federasi Veteran Sedunia.

Salinan

28 Januari 1965

1 sampul

195. SK. Menteri Luar Negeri No. S.P/183/P.D/X/65 tentang penggantian nama Direktorat PBB menjadi Direktorat Kerjasama Internasional per 1 Maret 1965.

Salinan

11 Maret 1965

1 lembar

196. SK. Presiden No. 121/1966 tentang susunan delegasi pemerintahan RI yang akan mengadakan perundingan dengan delegasi Republik Philipina mengenai imigrasi dan lintas batas.

Salinan

2 Juni 1966

1 lembar